

# **KOORDINASI ANTARA DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATLANTAS DALAM MEMBERIKAN LAYANAN KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA JEMBER**

**Iwan Wahyudi**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

Email : [iwanodie@gmail.com](mailto:iwanodie@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satlantas Dalam Memberikan Layanan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kota Jember. Kawasan tertib lalu lintas merupakan kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Yang menjadi lokasi penelitian fokus perhatian penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Jember serta Satlantas Jember. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah Purposive Sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada teori dari Henry Fayol, berpendapat bahwa indikator dari koordinasi meliputi komunikasi, kerjasama, pembagian tugas dan pertemuan atau rapat. Dari hasil penelitian dan temuan data dari data primer maupun data sekunder, maka dinyatakan Koordinasi Dinas Perhubungan Dengan Satlantas Dalam Memberikan Layanan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kota Jember masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena masih ada koordinasi yang belum maksimal diantaranya pertemuan atau rapat dan pembagian tugas yang akan menyebabkan ketumpang tindih antar instansi.

**Kata Kunci** : *Koordinasi, Komunikasi, Kerjasama, Pembagian Tugas, Pertemuan Atau Rapat.*

## **PENDAHULUAN**

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau secara sah sudah menjadi penduduk negara Indonesia, pelayanan publik disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dimana yang berhak menjadi penerima pelayanan publik adalah perseorangan atau kelompok. Masyarakat merupakan pelanggan atau penerima

pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri, kualitas pelayanan publik dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat dan juga bisa menjalin ikatan antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan PP No 38 Tahun 2017 Bab 2 Pasal 4b dan Pasal 5b tentang Inovasi Daerah bahwa inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa public dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

Dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, menurut Permenpan No 17 Tahun 2017 tentang pedoman nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat namun kebijakan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila pegawai atau aparatur pemerintah tidak melakukannya secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di suatu kota maka akan terjadi peningkatan pula pada jumlah transportasi di kota tersebut, yang berdampak pada peningkatan kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang untuk melakukan perjalanan. Keselamatan merupakan salah satu dari prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Pemerintah wajib menyediakan dan memberikan pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, dan lancar agar masyarakat merasa selamat dan nyaman disaat melakukan kegiatan transportasi khususnya aktivitas rekreasi dan belanja pada kawasan Kabupaten Jember ini yang terus mengalami peningkatan pembangunan

Kepadatan lalu lintas di jalan raya tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat sehingga bermanfaat bagi keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas. Hal ini terbukti dengan data bahwa pada tahun 2012 sampai 2016 trend data pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan.

Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomer 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bab 2 ayat 3 dan 4 Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan.
- e. pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan operasional, bimbingan keselamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan angkutan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, bandara, terminal tipe C;
- h. pemberian surat izin rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- i. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan perkeretaapian; dan
- j. pelaksanaan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.

Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mempunyai peranan penting dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas sebagai dinas yang menangani bidang transportasi dan perhubungan. Dengan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dinas perhubungan kabupaten jember meningkatkan penjagaan pos-pos pantau untuk kawasan tertib lalu lintas yaitu ada 18 pos pantau untuk pengawasan ada 4 pos pantau terpadu. Seperti yang di jelaskan di atas bahwa Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas akan tetapi apakah sudah sesuai harapan masyarakat pelayanan yang di berikan oleh Dinas Perhubungan kabupaten jember.

Dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan di jelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas serta memudahkan bagi pemakai jalan. Maka jalan wajib

dilengkapi rambu-rambu lalu lintas dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya untuk menuntun, mengarahkan, melarang dan sebagainya agar pergerakan lalu lintas aman, lancar dan nyaman.

Dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas Dinas Perhubungan kabupaten jember juga berkoordinasi dengan Satlantas demi mewujudkan pelayanan transportasi yang lebih baik untuk jember, termasuk menciptakan kondisi lalu lintas dan keamanan warga. Kawasan tertib lalu lintas merupakan kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Koordinasi**

Dari beberapa pendapat diatas tentang fungsi manajemen, Peneliti lebih cenderung memakai fungsi manajemen menurut Henry Fayol untuk menjawab bahwa koordinasi dalam organisasi itu sangat penting. Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Henry Fayol adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan (Planing)

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan.

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap karyawan penetapan departemen-departemen (subsistem) dan penentuan hubungan-hubungan

c. Pengarahan (commanding)

Fungsi pengarahan (commanding) merupakan fungsi yang dapat ditetapkan setelah rencana, organisasi dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan maka proses manajemen dalam merealisasi tujuan bisa dimulai

d. Pengkoordinasian (coordinating)

Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dan pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegritaskan dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi itu sangat penting dalam suatu organisasi. Beberapa alasan mengapa pengkoordinasian sangat penting yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi.
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
4. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi

e. Pengendalian (controlling)

Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena harus dilakukan dengan baik.

Peneliti menyimpulkan bahwa fungsi koordinasi dalam manajemen sangatlah penting, karena dengan adanya koordinasi organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan efektif dan efisien dan untuk mencapai tujuan bersama.

### **Kawasan Tertib Lalu Lintas**

**Keselamatan dan keamanan di jalan raya** merupakan hal paling penting saat berkendara. Banyak kecelakaan terjadi justru disebabkan oleh faktor kelalaian penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran pengguna jalan raya yang semakin rendah. Padahal seharusnya faktor keselamatan di jalan raya yang harus diprioritaskan lebih dahulu dari pada kepentingan yang lain. Banyak pengemudi maupun pengguna jalan lebih mementingkan target *selamat sampai*

*tujuan* dengan berbagai alasan, sehingga mereka lebih sering melaju dengan kecepatan tinggi dan kurang memikirkan faktor keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan yang lain.

Padahal jika kita mau bersabar dan saling menghormati tentu dapat meminimalkan angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Pelajari belajar cara stir mengemudi mobil yang benar. Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Masalah Ketertiban Berlalu lintas di Jalan Raya menjadi tanggung jawab bersama, Bukan hanya pihak kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan. Seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas.

Hal seperti ini setidaknya mengurangi tingginya angka kecelakaan di jalan raya, banyak lagi peraturan-peraturan di jalan raya yang seharusnya kita patuhi yaitu tidak menerobos Lampu Merah, Menggunakan helm setiap berkendara roda dua dan juga setiap pengendara seharusnya memiliki surat pengendara yang lengkap sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi masih banyak juga pengendara yang tidak menghiraukan hal seperti itu sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan tingginya angka kecelakaan banyak korban yang hilang nyawa di jalan raya akibat kecerobohan dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas di jalan raya, Sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan. semoga hal ini bisa membangun kesadaran kita bersama untuk menyadari bahwa pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas di jalan raya.

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Jember No 37 Tahun 1997 bahwa kawasan tertib lalu lintas meliputi:

1. Jalan Gajah Mada;

2. Jalan Raya Sultan Agung;
3. Jalan PB. Sudirman;
4. Jalan Achamd Yani;
5. Jalan Trunojoyo;
6. Jalan Cokroaminoto;
7. Jalan Panjaitan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan November – Desember 2018. Sumber data diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Penentuan informan dilakukan dengan cara metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis menurut Miles dan Huberman (1992:15-19) yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Syamsul sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas dan wawancara dari Bapak Agus Yudi K sebagai Kepala Dikyasa dapat di simpulkan bahwa, komunikasi yang

dilakukan antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas di Kota Jember sudah dilakukan dengan cukup baik. Dimana dalam melakukan koordinasi dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas di Kota Jember, setiap anggota dari Dinas Perhubungan maupun dari Satlantas sudah menggunakan alat komunikasi HT dan juga anggota sudah melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dengan seluruh anggota yang sudah terbentuk dalam kawasan tertib lalu lintas.

Agar komunikasi ini berjalan dengan efektif setiap dari anggota masing-masing harus berusaha semaksimal mungkin untuk menginformasikan tujuan yang jelas kepada seluruh anggota, karena kejelasan dalam memberikan informasi itu sangat penting bagi seluruh petugas yang bertugas dalam kawasan tertib lalu lintas dan menjadi dasar bagi seluruh anggota yang bertugas. Komunikasi yang efektif harus ada timbal balik dari setiap komunikasi yang dilakukan, karena dengan adanya timbal balik tersebut akan memperjelas dan mensinergikan setiap perintah pada saat memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas yang akan dilaksanakan oleh seluruh anggota yang bertugas. Komunikasi yang efektif juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung dalam kawasan tertib lalu lintas, dimana ketersediaan sarana dan prasarana akan mempermudah komunikasi dalam layanan kawasan tertib lalu lintas.

## **2. Kerjasama**

Kerjasama yang di laksanakan dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas hal ini di tunjukan dengan adanya saling pengertian antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah di tetapkan dalam Forum LLAJ. Dalam kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, kerjasama ini akan memberikan manfaat yang lebih baik dari pada di kerjakan oleh satu pihak saja. Dalam mencapai tujuan bersama, kerjasama akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua instansi dan juga mendorong anggota dari masing-masing pihak agar lebih produktif, efektif, dan efisien.

### **3. Pembagian Tugas**

Pembagian tugas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas. Hal ini di tunjukkan dengan kemampuan dari anggota masing-masing instansi dalam melaksanakan tugasnya sesuai pedoman rincian dan uraian tugas masing-masing instansi terkait koordinasi dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Leon Lazuardy selaku Kepala Bidang Lalu lintas untuk tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, bagaimana tugas dari Dinas Perhubungan dalam kawasan tertib lalu lintas, menyatakan bahwa:

“Untuk tugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam layanan kawasan tertib lalu lintas yaitu lebih ke penyediaan sarana prasarana lalu lintas seperti marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas dan untuk kawasan tertib lalu lintas Dinas Perhubungan memberi himbauan apabila ada pengendaraan melanggar lalu lintas maka di beri arahan dan himbauan pihak dari Dinas Perhubungan tidak boleh menilang”. (Bapak Leon Lazuardy 24 November 2018 di Dinas Perhubungan)

### **4. Pertemuan Dan Rapat**

Pertemuan atau rapat yang dilakukan dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas antara Dinas Perhubungan dan Satlantas untuk rapat formalnya ada Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Fungsi dari forum lalu lintas angkutan jalan yaitu sebagai wahana yang menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa kebanyakan anggota yang sudah terbentuk hanya bertemu di lokasi kawasan tertib lalu lintas dan langsung bertugas untuk memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas. Padahal proses koordinasi yang dilaksanakan harus terstruktur dan sistematis, supaya proses yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan pelaporan kegiatan kawasan tertib lalu lintas juga berjalan dengan baik. Oleh karena itu upaya untuk peningkatan pertemuan dan rapat koordinasi dalam

memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas harus adanya jadwal yang jelas terlebih dalam rapat kawasan tertib lalu lintas agar ide-ide atau keluhan dari masing-masing pihak bisa teratasi dan menemukan solusi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan analisa dari peneliti melakukan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai koordinasi dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas di Kota Jember maka diperoleh kesimpulan dari indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui dan menganalisis layanan kawasan tertib lalu lintas di Kota Jember.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas di Kota Jember sudah berjalan dengan cukup baik. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada koordinasi yang dilakukan belum maksimal. Salah satunya pelaksanaan koordinasi yang belum berjalan optimal adalah kegiatan rapat atau pertemuan dan pembagian tugas. Karena dalam koordinasi yang dilakukan, rapat koordinasi jarang sekali dilakukan dan tidak ada jadwal tetap untuk rapat tentang kawasan tertib lalu lintas dan juga pembagian tugas yang dilakukan antara Dinas Perhubungan dan Satlanta ada perbedaan pendapat dari kedua belah pihak yaitu tentang penetapan pos terpadu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pendapat dari Dinas perhubungan bahwa di pos terpadu seharusnya ada dari anggota polisi juga yang ikut memonitoring kawasan tertib lalu lintas sedangkan pendapat dari Satlanta sendiri bahwa anggota kami ada di pos terpadu hanya pada saat ada operasi gabungan. Padahal dengan adanya rapat-rapat yang dilakukan dapat memunculkan ide-ide atau gagasan dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas dan juga masalah seperti pembagian anggota dalam pos terpadu tersebut bisa diselesaikan di rapat tersebut dan juga di perjelas pembagiannya apa

memang seharusnya ada dari kedua anggota atau tidak sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan antar kedua instansi tersebut.

- b. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas di Kota Jember.
  - 1) Faktor penghambat external yaitu kesadaran masyarakat dan parkir liar karena realitanya faktor tersebut termasuk dalam kesadaran masyarakat yang kurang mengerti tentang rambu-rambu lalu lintas dan marka
  - 2) Faktor penghambat internal yaitu kekurangan jumlah anggota menjadi kelemahan dalam menjalankan koordinasi tersebut padahal jika jumlah anggota mencukupi maka akan memberikan atau mempertahankan layanan kawasan tertib lalu lintas jadi dapat berkurang beban pekerjaan apabila jumlah anggota mencukupi
  - 3) Faktor pendukung yaitu tersedianya sarana prasarana seperti rambu-rambu lalu lintas jalan dan marka jalan

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang koordinasi antara Dinas Perhubungan dan Satlantas dalam memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas di Kota Jember peneliti mencoba memberi saran sebagai berikut

- a. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas perhubungan dan Satlantas belum maksimal, sehingga diberikan saran-saran sebagai bentuk masukan dan solusi. Dalam pembagian tugas untuk pembagian pos terpadu yang mana masih ada perbedaan pendapat dari kedua instansi dan juga pertemuan atau rapat jarang dilakukan sehingga dapat munculnya masalah-masalah dilapangan. Solusinya adalah pertemuan dan rapat dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan begitu masalah seperti diatas akan dapat terselesaikan dengan baik

- b. Penambahan jumlah anggota dimana hal ini untuk mengatasi kekurangan anggota pada saat kawasan tertib lalu lintas dan penambahan anggota ini bertujuan untuk meringankan tugas untuk memberikan layanan kawasan tertib lalu lintas jika anggota memadai akan terciptanya kawasan tertib lalu lintas di Kota Jember .

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Referensi Buku**

Brantas, *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabeta: Bandung, 2009

Handoko, T. Hani. *Managemen edisi kedua*. BPFE: Yogyakarta, 2003

Hasibuan, melayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. edisi kedua*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

Handayani, Soewarno, *Pengantar Study Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta, 2002

### **Referensi Undang-undang**

Peraturan Bupati No 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

### **Referensi Internet**

Qamal, *Koordinasi Kepolisian Dan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Becak Motor Di Kota Makasar (2016)*, di akses 9 Oktober 2018  
<https://media.neliti.com>

Hendrayana, *Koordinasi Pemasangan Cctv Dan Rambu Lalu Lintas Antara Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Bersama Polda Kaltim Dan BPTD XVIIKaltimara(2018)* di akses 11 Oktober 2018

<https://dishub.kaltimprov.go.id/index.php/informasi/item/253-koordinasi-pemasangan-cctv-dan-rambu-lalu-lintas-antara-dishub-prov-kaltim-bersama-polda-kaltim-dan-bptd-xvii-kaltimara>

### **Referensi Artikel**

Siti Muanisah dan Drs. Ernawati, Si, *Koordinasi Pengaturan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Siak* (2014), di akses 25 januari 2019

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3352>

Hara Eka Triguna, *Koordinasi Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru* (2015), diakses 9 Oktober 2018

<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5076/4956>

### **Referensi Skripsi**

Pranita Mihardi, *koordinasi dins perhubungan dalam meningkatkan pelayanan jasa transportasi angkutan kota (angkot) di bandar lampung* (2018)

